

**Kerangka Acuan Kegiatan**  
**PENILAIAN KOTA MANDIRI “KOTA JUARA”**  
**PNPM MANDIRI PERKOTAAN**

**A. LATAR BELAKANG**

PNPM Mandiri Perkotaan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tahun 2014 ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah memasuki tahun ketujuh; namun demikian beberapa isu yang berkembang terkait implementasi di lapangan masih digerakan oleh para konsultan.

Walaupun P2KP / PNPM Mandiri Perkotaan telah dinilai memiliki konsep program, dan pedoman yang memadai untuk suatu program penanggulangan kemiskinan dan bergerak secara dinamis serta positif, namun tanpa didukung kesiapan kapasitas personal lokal (Pemerintah Daerah) yang memadai; terutama mereka yang berada di level kota dan kelurahan maka program ini sulit untuk berlanjut dan meraih keberhasilan.

Program ini telah menerapkan konsep dan mekanisme pengendalian melalui 2 cara, yaitu : Tidak Langsung dan Langsung. Pengendalian Tidak Langsung yang berbasis data/informasi SIM tentu mengandalkan kecepatan, kelengkapan, dan keakuratan data-data kegiatan yang dikirimkan dari daerah ke pusat. Sedangkan Pengendalian Langsung ke lapangan mengandalkan validitas data yang dikumpulkan dan jangkauan terhadap lokasi yang menjadi sample sehingga dapat menunjukkan dengan tepat proses dan hasil kegiatan masyarakat di lapangan. Namun demikian, kedua tools pengendalian tersebut masih dikuasai konsultan dan menjadi konsumsi pemerintah pusat, sementara Pemerintah daerah belum menguasai dan belum dianggap membutuhkannya.

Berdasarkan strategi PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2013 – 2014 substansi pendampingan program memasuki tahap keberlanjutan, dimana pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten dan masyarakat dapat secara mandiri menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan tersebut KMP memandang penting untuk mengadakan PENILAIAN KOTA MANDIRI KOTA JUARA untuk seluruh kota/kabupaten disemua lokasi sasaran.

**B. TUJUAN**

Penilaian ini bertujuan untuk diperolehnya nilai kesiapan kota/kabupaten dalam mengelola keberlanjutan PNPM Mperkotaan .

Adapun tujuan khusus dari penilaian tersebut adalah :

1. Tim Korkot dan Pemerintah Daerah memahami dan menyadari indikator-indikator kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola PNPM MP secara mandiri.

2. Tim Korkot mampu mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola PNPM Mandiri Perkotaan dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen serta kesiapan untuk mengelola PNPM MP secara mandiri.
3. Diketahui rangking Kota/Kabupaten yang paling memiliki kesiapan untuk mengelola PNPM MP secara mandiri dan bisa dipantau perkembangannya oleh semua pelaku.

### **C. KELUARAN YANG DIHARAPKAN**

1. Tim Korkot dan Tim Pemda memiliki tujuan serta indikator yang sama dalam rangka mempersiapkan Kota/Kabupaten untuk mengelola PNPM MP secara mandiri.
2. Tim Korkot dan Tim Pemda secara bersama-sama mampu menilai kesiapan kota/kabupatennya masing-masing serta memiliki rumusan strategi pemenuhan indikator untuk perbaikan peringkat kota/kabupatennya dilevel nasional.
3. Rangkaing kota/kabupaten yang paling memiliki kesiapan untuk mengelola PNPM MP secara Mandiri.

### **D. METODOLOGI**

Dilevel kota, bentuk kegiatan dalam Penilaian Kota Mandiri ini berupa Diskusi Kelompok Terarah (DPT/FGD) menggunakan format penilaian kota/kabupaten dan setelah format penilaian terisi peserta diajak merumuskan strategi perbaikan untuk memenuhi indikator yang belum tercapai.

Dilevel Provinsi, bentuk kegiatannya merekap/merengking nilai semua kota/kabupaten dan menginformasikannya kepada Korkot dan Pemda. Dilevel provinsi juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

Dilevel Pusat, bentuk kegiatannya merekap/merengking nilai semua kota yang dikirim dari Provinsi dan menayangkannya di Web p2kp.org. Dilevel Pusat juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

### **E. WAKTU**

Kegiatan penilaian kota ini akan dilakukan disemua kota kabupaten yang menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan. Penilaian dimulai bulan Juni-Agustus 2014 (sudah dilakukan) dan selanjutnya akan dilakukan setiap tiga bulanan; oktober-Desember 2014, Januari- Maret 2015.

## F. PESERTA

Peserta FGD/DPT Penilaian ini terdiri dari para stakeholder Kota/Kabupaten sebagai berikut :

No.	Unsur Peserta
1.	Tim Korkot
2.	Bappeda
3.	TKPKD
4.	KBP
5.	Forum BKM
6.	Satker/PPK
7.	DPRD
8.	dll

Nara Sumber dan Pemandu :

No.	Unsur
1.	Satker/PPK
2.	Team Leader / TA LG/Korkot

## G. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan FGD/DPT ini dibebankan kepada anggaran Daerah.

## H. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Pelaksana dari Korkot dan Pemda; dalam bentuk proceeding disertai keluaran (output) kegiatan. Laporan dibuat dan diserahkan kepada Pemda dan di cc ke KMW paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan selesai.

## I. PENUTUP

Kerangka acuan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai acuan bersama bagi pihak-pihak terkait khususnya pelaksana kegiatan di Provinsi dan Kota untuk koordinasi selama pelaksanaan kegiatan.